

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
 PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 21 TAHUN 2020
 TENTANG
 PETA JALAN (*ROAD MAP*) REFORMASI
 BIROKRASI KEMENTERIAN KOORDINATOR
 BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2020 – 2024

**RENCANA AKSI PELAKSANAAN PETA JALAN (*ROAD MAP*) REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KOORDINATOR
 BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2020 - 2024**

NO.	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN					KET.
							2020	2021	2022	2023	2024	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
A	Manajemen Perubahan											
1	Komitmen pimpinan dan pegawai terhadap pelaksanaan RB dinilai masih perlu ditingkatkan	Meningkatnya penerapan pelaksanaan RB di Kementerian Koordinator	Indeks pengembangan budaya kerja	Pembentukan Tim RB Pusat dan Unit Kerja	SK Tim RB Pusat dan Unit Kerja	Bagian Reformasi Birokrasi, Biro Hukum dan Organisasi	X	X	X	X	X	
Workshop dan sosialisasi RB oleh pimpinan tertinggi				Laporan workshop dan sosialisasi RB	X		X	X	X	X		

NO.	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN					KET.
							2020	2021	2022	2023	2024	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		Bidang Perekonomian		Survei pengembangan budaya kerja	Laporan survei pengembangan budaya kerja		X	X	X	X	X	
			Indeks harapan pegawai terhadap organisasi	Survei harapan pegawai terhadap organisasi	Laporan hasil survei harapan pegawai terhadap organisasi		X	X	X	X	X	
			Persentase agen perubahan yang berhasil mewujudkan inovasi dan diterapkan di unitnya	Penetapan dan pengukuhan agen perubahan	Jumlah agen perubahan		X	X	X	X	X	
				Monitoring dan evaluasi inovasi agen perubahan	Laporan hasil monitoring		X	X	X	X	X	
			Persentase inovasi unit kerja yang berhasil mendapatkan reward instansi	Sosialisasi inovasi/proyek perubahan tiap unit kerja	Jumlah unit kerja/pegawai yg disosialisasi		X	X	X	X	X	
				Monitoring dan evaluasi inovasi unit kerja	Laporan hasil Monitoring		X	X	X	X	X	

NO.	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN					KET.
							2020	2021	2022	2023	2024	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
2	Tim RB perlu meningkatkan pengendalian pelaksanaan kebijakan RB dengan baik	Meningkatnya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan RB	Persentase Unit Kerja/Pokja yang Indeks RB-nya Minimal Baik	Penyusunan Peta Jalan (<i>Road Map</i>) RB	Dokumen Peta Jalan (<i>Road Map</i>) RB		X					
				Sosialisasi dan internalisasi	Jumlah pegawai yg disosialisasi		X	X	X	X	X	
			Persentase Unit Kerja/Pokja yang pimpinannya melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi RB secara berkala	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB di Unit Kerja oleh pimpinan	Laporan hasil Monitoring		X	X	X	X	X	
			Persentase Unit Kerja/Pokja yang menindaklanjuti rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi	Monitoring dan evaluasi hasil kinerja Tim RB	Laporan hasil monitoring dan evaluasi Tim RB		X	X	X	X	X	

NO.	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN					KET.
							2020	2021	2022	2023	2024	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
			Indeks PMPRB	Perencanaan dan pengorganisasian PMPRB, PMPRB <i>on line</i> yang dilakukan setiap tahun oleh Inspektorat	Dokumen rencana Kerja PMPRB	Inspektorat	X	X	X	X	X	
			Persentase anggota tim asesor PMPRB yang <i>qualified</i>	Pelatihan bagi Tim Asessor PMPRB, serta sosialisasi terkait tugas dan fungsi asesor	Tim Asessor PMPRB		X	X	X	X	X	
B	Penataan Peraturan Perundang-undangan											
1	Masih adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang perekonomian	Meningkatnya efektivitas peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian	Persentase produk hukum yang tidak harmonis yang selesai diselaraskan yang menambah nilai manfaat	Pemetaan/reviu/kajian peraturan perundang-undangan	Dokumen pemetaan	Bagian Hukum I dan II, Biro Hukum dan Organisasi	X	X	X	X	X	
				Penyusunan peraturan	Jumlah peraturan yang disusun		X	X	X	X	X	
				Penyelarasan peraturan perundangan	Jumlah peraturan yang diselaraskan		X	X	X	X	X	
			Indeks Kualitas Kebijakan	Penyusunan perencanaan kebijakan	Dokumen perencanaan kebijakan	Para Deputi, Biro Perencanaan, dan Biro Hukum dan Organisasi			X		X	
				Implementasi kebijakan	Dokumen implementasi kebijakan		Para Deputi, Biro Perencanaan, dan Biro Hukum dan Organisasi			X		X

NO.	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	PENANGGUNG JAWAB	TAHUNPELAKSANAAN					KET.
							2020	2021	2022	2023	2024	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
2	Masih adanya gugatan perdata, tata usaha negara (gugatan hukum), dan permohonan uji materil peraturan yang menarik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai pihak tergugat/termohon maupun turut tergugat.	Meningkatnya penyelesaian kasus gugatan hukum dan permohonan uji materil	Persentase kasus gugatan hukum dan permohonan uji materil yang berhasil dimenangkan oleh Kemenko Perekonomian	Analisis hukum terkait gugatan hukum atau permohonan uji materil yang diterima	Dokumen kajian	Bagian Hukum I dan II, Biro Hukum dan Organisasi	X	X	X	X	X	
				Penyiapan dokumen persidangan yang diperlukan	Dokumen persidangan		X	X	X	X	X	
				Penyiapan alat bukti	Daftar/dokumen alat bukti		X	X	X	X	X	
				Pendampingan dalam proses persidangan	Dokumentasi sidang		X	X	X	X	X	
				Laporan hasil sidang	Putusan sidang		X	X	X	X	X	
C	Penataan dan Penguatan Organisasi											
1	Organisasi unit kerja belum sesuai dengan kinerja yang akan diwujudkan sebagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian	Terwujudnya organisasi sederhana yang kaya fungsi dan mencerminkan Renstra Kementerian	Persentase pemenuhan penetapan organisasi sederhana yang kaya fungsi dan mencerminkan Renstra Kementerian	Evaluasi dan penyusunan organisasi yang sesuai dengan Renstra Kementerian	Penetapan organisasi yang sesuai dengan Renstra Kementerian	Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Sumber Daya Manusia, Bagian Reformasi Birokrasi, dan Bagian Fasilitasi Penguatan Kinerja	X	X				
				Melakukan pemetaan jabatan fungsional dengan melibatkan instansi pembina	Peta jabatan fungsional		X	X				

NO.	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN					KET.
							2020	2021	2022	2023	2024	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
				Melakukan sosialisasi dengan melibatkan partisipasi aktif pegawai	Laporan sosialisasi		X	X				
				Mendesain unit yang menangani jabatan fungsional yang ada disertai kelengkapan-kelengkapan lainnya	Penetapan organisasi jabatan fungsional		X	X				
		Meningkatnya kapasitas organisasi	Persentase ditetapkannya dokumen Anjab, ABK, dan peta jabatan yang baku dalam bentuk peraturan resmi	Penyusunan dokumen Anjab, ABK, dan peta jabatan yang ditetapkan	Jumlah Anjab, ABK, dan peta jabatan yang ditetapkan		X	X				
			Persentase terwujudnya desain pengelompokan rumpun tugas	Evaluasi dan penyusunan organisasi yang sesuai dengan Renstra Kementerian	Penetapan organisasi yang sesuai Renstra Kementerian		X	X	X	X	X	

NO.	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	PENANGGUNG JAWAB	TAHUNPELAKSANAAN					KET.
							2020	2021	2022	2023	2024	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
			dan fungsi organisasi yang sesuai dengan Renstra Kementerian	Melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap Anjab, ABK, dan peta jabatan yang ditetapkan terhadap tugas yang diberikan dengan melibatkan peran aktif pegawai melalui kuesioner	Laporan monitoring dan evaluasi Anjab, ABK, dan peta jabatan		X	X	X	X	X	
			Indeks kelembagaan	Evaluasi dan penyusunan draft organisasi baru	Draft organisasi baru					X	X	
		Terwujudnya pemahaman pegawai terhadap Anjab, ABK, dan peta jabatan	Persentase pemahaman pegawai terhadap dokumen Anjab, ABK, dan peta jabatan	Sosialisasi Anjab, ABK, dan peta jabatan	Laporan Sosialisasi Anjab, ABK, dan peta jabatan		X	X	X	X	X	
D	Penataan Tata Laksana											
1	Proses bisnis yang menggambarkan koordinasi dan sinergi antarunit maupun interunit	Terciptanya keselarasan dan sinergitas antarunit yang mencerminkan	Persentase dokumen proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi	Menyusun dokumen peta bisnis proses sesuai dengan tugas dan fungsi	Jumlah dokumen proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi	Bagan Organisasi dan Tata Laksana, Biro Hukum dan Organisasi	X	X	X	X	X	

NO.	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	PENANGGUNG JAWAB	TAHUNPELAKSANAAN					KET.
							2020	2021	2022	2023	2024	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
	dalam mewujudkan kinerja K/L belum disusun, sehingga unit yang ada belum merupakan turunan dari proses bisnis. Hal ini akan berpotensi menimbulkan <i>silo</i> antar dan interunit yang dapat berdampak pada duplikasi tugas dan fungsi yang akhirnya dapat berakibat pada pemborosan anggaran	<i>cascading</i> dalam suatu unit organisasi	Persentase SOP yang sesuai dengan proses bisnis	Mereviu dan menyempurnakan SOP sesuai proses bisnis	Jumlah SOP yang direviu dan disempurnakan		X	X	X	X	X	
				Mengintegrasikan sistem informasi yang mempunyai kesamaan fungsi	Sistem aplikasi yang terintegrasi			X	X	X	X	X
2	Pengembangan <i>e-government</i> untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan proses pemberian layanan kepada publik	Meningkatnya penerapan <i>e-goverment</i>	Persentase unit yang menerapkan pedoman SPBE	Menyusun peta jalan (<i>road map</i>) pengembangan aplikasi dan desain <i>enterprise architecture</i> sebagai penerjemahan RITIK yang sudah ada	Dokumen peta jalan (<i>road map</i>) pengembangan aplikasi yang fungsional yang telah ditetapkan	Bagian Data dan Sistem Informasi, Biro Perencanaan	X	X	X	X	X	
			Indeks SPBE	Penyusunan kebijakan SPBE	Dokumen kebijakan SPBE			X	X	X	X	X

NO.	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN					KET.
							2020	2021	2022	2023	2024	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
	masih belum terkoordinasi dengan baik, walaupun sudah memiliki rencana pengembangan <i>e-government</i> yang terpadu.			Pelaksanaan tata kelola SPBE	Dokumen tata kelola SPBE							
				Pelaksanaan layanan SPBE	Laporan layanan SPBE							
				Monitoring penerapan SPBE	Dokumen monitoring dan evaluasi berkala terhadap penerapan SPBE		X	X	X	X	X	
		Terwujudnya tata kelola kearsipan yang lebih baik	Indeks pengawasan kearsipan	Perencanaan dan pengelolaan manajemen arsip	Laporan pengawasan kearsipan	Bagian Rumah Tangga, Biro Umum	X	X	X	X	X	
		Terwujudnya tata kelola manajemen aset yang lebih baik	Indeks pengelolaan aset	Perencanaan dan pengelolaan manajemen aset	Dokumen pengelolaan aset			X	X	X		
E	Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia											
1	Pelaksanaan manajemen kinerja individu yang selaras dengan manajemen kinerja unit atau organisasi yang hasilnya dapat dimanfaatkan	Meningkatnya Manajemen Pengelolaan SDM	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi yang sesuai dengan Renstra Kementerian	Tersusunnya dokumen standar kompetensi pegawai yang sesuai dengan Renstra Kementerian	Dokumen rewiu dan atau dokumen standar kompetensi (managerial, teknis, dan sosial kultural) yang ditetapkan	Bagian Sumber Daya Manusia, Biro Umum	X	X	X	X	X	

NO.	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN					KET.
							2020	2021	2022	2023	2024	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
	untuk pengembangan kompetensi dan pengembangan karir pegawai guna mendukung pelaksanaan pengelolaan SDM yang berbasis merit masih belum maksimal.		Persentase unit yang melakukan penilaian kinerja ASN sesuai PK	Melakukan penilaian pegawai berdasarkan capaian kinerja	Dokumen capaian kinerja pegawai		X	X	X	X	X	
			Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan rencana pengadaan Jabatan	Mereviu ulang hasil asesmen sebagai dasar dalam melakukan pengembangan pegawai	Laporan hasil review asesmen		X	X	X	X	X	
			Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensi sesuai dengan rencana pengembangan pegawai	Melaksanakan Diklat sesuai dengan hasil asesmen	Laporan pelaksanaan Diklat		X	X	X	X	X	
				Penyusunan dokumen HCDP	Dokumen penetapan HCDP		X	X				
			Persentase penempatan pegawai yang memenuhi	Mutasi dan promosi pegawai yang memenuhi standard kompetensi	Dokumen mutasi dan promosi pegawai		X	X	X	X	X	

NO.	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN					KET.
							2020	2021	2022	2023	2024	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
			standar kompetensi	Menerapkan sistem manajemen talenta (<i>talent pool</i>) yang berdasarkan pada objektivitas penilaian asesmen center yang ada	Laporan penerapan sistem manajemen talenta (<i>talent pool</i>)		X	X	X	X	X	
2	Budaya kinerja di kalangan pegawai belum dikembangkan. Hal ini ditandai dengan belum berjalannya pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> yang didasarkan pada kinerja.	Terciptanya budaya kerja aparatur yang profesional	Persentase penurunan jumlah ASN yang melakukan pelanggaran disiplin	Internalisasi budaya kerja ASN	Dokumen monitoring penegakan disiplin pegawai		X	X	X	X	X	
Jumlah ASN yang mendapatkan <i>reward</i>			Menyusun indikator pegawai berprestasi dan menerapkannya	Dokumen pemberian <i>reward</i>		X	X	X	X	X		
Persentase unit yang menerapkan <i>reward</i> dan <i>punishment</i>			Melakukan penilaian berkala terhadap pegawai dalam penerapan <i>reward</i> dan <i>punishment</i>	Usulan pegawai yang mendapatkan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> dari laporan penilaian kinerja pegawai		X	X	X	X	X		
Tata kelola manajemen SOM yang		Indeks profesionalitas ASN	Pengelolaan beasiswa dan pemberian izin dan tugas belajar	Dokumen pengembangan pegawai		X	X	X	X	X		

NO.	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	PENANGGUNG JAWAB	TAHUNPELAKSANAAN					KET.
							2020	2021	2022	2023	2024	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		lebih baik		Pengelolaan diklat struktural dan diklat teknis	Dokumen pengembangan pegawai		X	X	X	X	X	
				Pengelolaan capaian kinerja pegawai	Laporan hasil kinerja pegawai (SKP dan Kinerja Bulanan)		X	X	X	X	X	
				Monitoring kinerja dan disiplin pegawai	Laporan kinerja disiplin dan kinerja pegawai		X	X	X	X	X	
			Indeks merit sistem	Perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan SDM	Dokumen perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan SDM		X	X	X	X	X	
F	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik											
1	Perlu peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemberian layanan dalam upaya untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan dalam pemberian pelayanan kepada	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik berbasis IT	Hasil survei kepuasan pelayanan masyarakat	Survei kepuasan pelayanan masyarakat	Laporan survei kepuasan pelayanan masyarakat	Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan	X	X	X	X	X	
			Persentase pelayanan berbasis IT yang terintegrasi	Pengembangan sistem pelayanan berbasis IT	Jumlah sistem pelayanan berbasis IT yang sudah dikembangkan	Bagian Data dan Sistem Informasi, Biro Perencanaan	X	X	X	X	X	

NO.	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN					KET.
							2020	2021	2022	2023	2024	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
	masyarakat		Persentase layanan publik yang teridentifikasi	Identifikasi layanan publik	Permenko Layanan Publik dan Standar Pelayanan Publik	Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan	X	X	X	X	X	
			Persentase standar pelayanan yang telah direviu dan diperbaiki	Reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	Laporan reviu dan rencana tindak lanjut		X	X	X	X	X	
			Indeks pelayanan publik	Penerapan standar pelayanan publik	Laporan survei kepuasan standar layanan		X	X	X	X	X	
				Pengelolaan dan peningkatan komunikasi informasi publik	Laporan strategi komunikasi terkait kebijakan pemerintah di bidang perekonomian	Bagian Manajemen Strategi dan Publikasi, Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan	X	X	X	X	X	
					Dokumen <i>award</i> /penghargaan yang diperoleh	Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan	X	X	X	X	X	

NO.	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN					KET.
							2020	2021	2022	2023	2024	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
					Jumlah layanan dan komunikasi publik menggunakan media sosial dan <i>website</i>	Bagian Manajemen Strategi dan Publikasi, Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan	X	X	X	X	X	
					Jumlah sarana dan prasarana pendukung dalam rangka penerapan inovasi pelayanan publik	Bagian Rumah Tangga, Biro Umum	X	X	X	X	X	
			Persentase rekomendasi Ombudsman RI atas pelayanan publik yang telah ditindaklanjuti	Tindak lanjut atas rekomendasi Ombudsman RI atas pelayanan publik	Laporan tindak lanjut	Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan	X	X	X	X	X	
		Meningkatnya penanganan pengaduan pelayanan	Persentase pengaduan masyarakat yang telah diselesaikan	Pengintegrasian sistem pengelolaan pengaduan masyarakat	Laporan tindak lanjut pengaduan masyarakat	Inspektorat dan Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan	X	X	X	X	X	

NO.	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN					KET.
							2020	2021	2022	2023	2024	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
G Penguatan Pengawasan												
1	Pelaksanaan pengawasan untuk membangun integritas organisasi melalui unit pengendali gratifikasi, penerapan sistem <i>whistle blower</i> , benturan kepentingan dan pembangunan zona integritas pada unit kerja pelayanan masih belum optimal dilakukan dalam upaya pencegahan terjadinya korupsi	Meningkatnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal	Persentase rencana pengendalian yang dilaksanakan sesuai target	Mengidentifikasi resiko dan merencanakan pengendalian	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Inspektorat	X	X	X	X	X	
Maturitas SPIP			Melakukan sosialisasi terkait implementasi SPIP	Laporan hasil sosialisasi		X	X	X	X	X		
			Melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan manajemen risiko	Laporan monev implementasi manajemen risiko	Inspektorat	X	X	X	X	X		
			Melaksanakan kegiatan evaluasi terpisah	Laporan hasil evaluasi terpisah		X	X	X	X	X		
			Melakukan <i>self assesment</i> penyelenggaraan SPIP	Laporan hasil penilaian mandiri level maturitas SPIP		X	X	X	X	X		
			Penilaian eksternal oleh BPKP terkait implementasi SPIP	Laporan hasil penjaminan kualitas SPIP		X	X	X	X	X		
			Kapabilitas APIP	Melakukan kegiatan pengawasan berupa penjaminan dan konsultasi	Laporan hasil kegiatan pengawasan		X	X	X	X	X	

NO.	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN					KET.
							2020	2021	2022	2023	2024	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
				Melakukan peningkatan kompetensi SDM Inspektorat melalui pendidikan dan pelatihan	Laporan kegiatan pendidikan dan pelatihan		X	X	X	X	X	
				Menyusun perencanaan audit berbasis risiko	Dokumen perencanaan audit		X	X	X	X	X	
				Melaksanakan penilaian mandiri atas kapabilitas APIP Inspektorat	Laporan hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP		X	X	X	X	X	
				Penilaian eksternal oleh BPKP atas kapabilitas APIP	Laporan hasil penjaminan kualitas APIP (IACM)		X	X	X	X	X	
			Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Peningkatan kematangan UKPBJ	Laporan tingkat kematangan	Bagian Rumah Tangga, Biro Umum	X	X	X	X	X	
				Peningkatan kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ	Jumlah jabatan fungsional PPBJ		X	X	X	X	X	
			Opini BPK	Penyusunan laporan keuangan	Laporan keuangan	Bagian Keuangan, Biro Umum	X	X	X	X	X	
				Penyusunan laporan BMN	Laporan BMN	Bagian Rumah Tangga, Biro Umum	X	X	X	X	X	

NO.	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	PENANGGUNG JAWAB	TAHUNPELAKSANAAN					KET.
							2020	2021	2022	2023	2024	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
				Reviu laporan keuangan	Laporan reviu	Inspektorat	X	X	X	X	X	
				Pemeriksaan laporan keuangan	Laporan hasil pemeriksaan BPK	Bagian Keuangan, Bagian rumah Tangga, Biro umum dan Inspektorat	X	X	X	X	X	
		Meningkatnya penerapan sistem integritas	Persentase satuan kerja memasuki WBK/WBBM	Membangun zona integritas	Jumlah unit kerja yang dibangun	Inspektorat	X	X	X	X	X	
			Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti tepat waktu	Memproses pengaduan	Jumlah pengaduan yang diproses		X	X	X	X	X	
			Persentase pelanggaran kebijakan benturan kepentingan yang ditindaklanjuti	Melakukan sosialisasi kebijakan benturan kepentingan	Jumlah pegawai yang diberi sosialisasi		X	X	X	X	X	
				Pemeriksaan pelanggaran kebijakan benturan kepentingan	Laporan jumlah pelanggaran kepentingan yang ditindaklanjuti		X	X	X	X	X	
			Persentase hasil evaluasi penerapan	Melakukan sosialisasi gratifikasi	Jumlah pegawai yang diberi sosialisasi		X	X	X	X	X	

NO.	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	PENANGGUNG JAWAB	TAHUNPELAKSANAAN					KET.
							2020	2021	2022	2023	2024	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
			kebijakan gratifikasi yang ditindaklanjuti	Menindaklanjuti laporan gratifikasi	Laporan hasil evaluasi gratifikasi yang di tindaklanjuti		X	X	X	X	X	
			Persentase hasil evaluasi penerapan kebijakan WBS yang ditindaklanjuti	Melakukan sosialisasi WBS	Jumlah pegawai yang diberi sosialisasi		X	X	X	X	X	
				Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan gratifikasi, WBS	Laporan hasil monev		X	X	X	X	X	
				Menindaklanjuti laporan WBS	Laporan hasil evaluasi WBS yang di tindaklanjuti		X	X	X	X	X	
H	Penguatan Akutabilitas											
1	Penerapan Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik belum seluruhnya	Peningkatan penerapan SAKIP di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Persentase unit kerja yang menerapkan SAKIP dengan sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen	Melakukan penyusunan peta strategi di seluruh tingkatan entitas akuntabilitas kinerja	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Peta Strategi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Bagian Fasilitasi Penguatan Kinerja, Biro Perencanaan	X	X	X	X	X	

NO.	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN					KET.
							2020	2021	2022	2023	2024	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
	menggambarkan efektivitas pengelolaan kinerja yang dikaitkan dengan kinerja yang dihasilkan		kinerja yang andal, dan memenuhi kategori indeks SAKIP "Sangat Baik (BB)".	Menyusun sistem manajemen kinerja berbasis <i>balanced scorecard</i>	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian		X	X	X	X	X	
				Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja dengan mengintensifkan pelaksanaan dialog kinerja organisasi	Dokumen monitoring dan evaluasi Kinerja		X	X	X	X	X	
7	Program dan kegiatan yang dilakukan belum dipastikan mendukung langsung pencapaian sasaran strategis	Terwujudnya perencanaan yang berkualitas	Presentase unit kerja yang telah menyusun dokumen perencanaan yang berkualitas	Menyusun dokumen perencanaan yang terintegrasi dan lintas sektor	Renstra KL, Renja KL 2020 dan 2021	Bagian Program dan Anggaran, Biro Perencanaan	X	X	X	X	X	
				Melakukan sosialisasi penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah pegawai yang tersosialisasi		X	X	X	X	X	

NO.	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN					KET.
							2020	2021	2022	2023	2024	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
				Melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi <i>value for money</i> dalam rangka mewujudkan anggaran berbasis kinerja	Nilai Kinerja anggaran		X	X	X	X	X	
				Melakukan reviu dokumen rencana kerja dan anggaran	Laporan reviu	Inspektorat	X	X	X	X	X	

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



I Ketut Hadi Priatna
NIP. 197405071999031002